PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
2024 - 2026

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JL. SOEKARNO-HATTA NO.35 (69116)
TLP/FAX 031-3094179
Email : diskominfo@bangkalankab.go.id
B A N G K A L A N

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT dan atas rahmat serta hidayahNya, maka Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi aparat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan untuk melaksanakan program dan kegiatannya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan.

Perencanaan Strategis ini akan senantiasa dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta peningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang lingkungan hidup. Diharapkan dokumen ini dapat menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman serta pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan kominfo di Kabupaten Bangkalan.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan masih terdapat kekurangan- kekurangan dengan kerendahan hati kami mengharap kritik dan saran dari berbagai pihak khususnya Tim Penyusun Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Akademisi dan *Stakeholder* untuk kesempurnaan dokumen ini.

Akhirnya, kami Tim Penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan Dokumen Renstra ini.

Bangkalan, 16 Desember 2024

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bangkalan

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Mohammad Hasan Faisal S.STP., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 198307142001121002

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis perangkat daerah adalah dokumen perencanaan untuk masa 3 (tiga) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan bersifat indikatif. Di dalam rencana strategis digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan.

Sebagai salah satu unsur perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan berkewajiban menyiapkan rencana strategis yang secara teknis merupakan penjabaran dari RPD Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 - 2026. Rencana strategis berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan pemerintahan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka 3 (tiga) tahun.

Dalam pelaksanaannya rencana strategis harus dijabarkan kembali ke dalam dokumen rencana kerja (Renja) yang memuat program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Kemudian hasil capaian program dan kegiatan tersebut wajib diinformasikan dan dilaporkan kepada *stakeholders* yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD), dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).

Pembenahan manajemen penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk melakukan perubahan dan pembaharuan dalam berbagai aspek diantaranya kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*), dan sumber daya aparatur yakni integritas, etos kerja, dan gotong royong dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta pelayanan yang berkualitas.

Sebagai Perangkat Daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan melaksanakan kewenangan pengelolaan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian. Diharapkan ketiga urusan pemerintahan ini dapat dilaksanakan sesuai rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis yang juga berfungsi sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan serta membantu pimpinan organisasi dalam mengelola dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mendukung tercapainya visi-misi Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026.

1.2 Landasan Hukum

Dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 - 2026, memperhatikan arah dan kebijakan yang bersumber dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang–Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Eknomi Di Kawasan Gresik Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, kawasan Bromo Tengger Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 4/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2044 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 6/E);
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Bupati Nomor 29 tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

1. Sebagai panduan dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan dalam mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan untuk jangka waktu 2024 - 2026 yang dijabarkan dalam rencana kerja tahunan;
2. Sebagai kerangka dasar bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan;
3. Sebagai alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang terukur.

1.3.2. Tujuan

1. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh

sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi;

2. Tersedianya instrumen awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja organisasi.
3. Menjamin tersedianya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan secara terukur.
4. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Tujuan, Sasaran, dan Program Prioritas Daerah

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renstra PD kabupaten Tahun 2024 – 2026

4.2 Cascading Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN

Upaya mewujudkan birokrasi yang profesional dan berintegritas tinggi merupakan upaya strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas. Sesuai dengan tugas dan fungsinya beberapa jenis pelayanan yang diberikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, diantaranya adalah :

1. Layanan informasi publik;
2. Layanan komunikasi publik dan pengaduan masyarakat;
3. Layanan komunikasi intra pemerintah daerah;
4. Layanan *data center* dan *disaster recovery center*;
5. Layanan penggunaan *domain* dan *sub domain* pemerintah;
6. Layanan keamanan informasi;
7. Layanan data statistik sektoral;

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 29 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, mempunyai tugas sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
b. Pelaksanaan kebijakan daerah bidang komunikasi dan informatika bidang statistik dan bidang persandian;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
d. Pelaksanaan administrasi dinas daerah bidang komunikasi dan

informatika ,bidang statistik dan bidang persandian;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Bangkalan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan amanah yang diemban Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan didukung oleh unsur-unsur organisasi yang terdiri dari:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika. Dalam melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi :

a. pengelolaan pelayanan administrasi umum;
b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
c. pengelolaan administrasi keuangan;

d. pengelolaan administrasi perlengkapan;

e. pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;

f. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;

g. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;

h. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hokum (non yustisia) di bidang kepegawaian;

i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas- tugas bidang;

j. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;

k. pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan

l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari 2 (dua) sub bagian yaitu :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

   Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:

   a. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan persuratan;

   b. melakukan penyiapan bahan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;

   c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;

   d. melakukan penyiapan bahan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah;

   e. melakukan penyiapan bahan laporan kinerja pejabat struktural;

   f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional; dan

g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan;
c. melakukan penyusunan anggaran;
d. melakukan pengelolaan dan penatausahaan keuangan;
e. melakukan pelaksanaan aku tansi dan verifikasi keuangan;
f. melakukan kegiatan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan daerah bukan pajak dan pelaporan keuangan;
g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
h. melakukan penyusunan laporan keuangan;
i. melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
j. melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
k. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja;
l. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
m. menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
n. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI); dan
o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP)

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi Kegiatan bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di

lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah, Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang informasi dan komunikasi publik;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkungan pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di kabupaten;
c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyedediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di kabupaten;
d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerinta daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di kabupaten;
e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan tekhnis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerinta daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di kabupaten;
f. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingku pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerinta daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media

komunikasi publik di kabupaten;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) membawahi subkoor :

1. SubKoor Pengelolaan Informasi Publik
2. SubKoor Pengelolaan Komunikasi Publik
3. SubKoor Pengelolaan Media Komunikasi Publik

4. Bidang Aplikasi Informatika (APTIKA)

Bidang Aplikasi dan Informatika mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan Bidang layanan Infrastruktur dasar, data *center*, *disaster recovery center* dan TIK Pemerintah Kabupaten, layanan internet dan pengguna akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generic, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi *e- goverment,* layanan system komunikasi intra pemerintah kabupaten. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, Bidang Aplikasi Informatika mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang aplikasi informatika;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK pemerintah kabupaten layanan internet dan pengguna akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generic, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan public dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi e-Govemment, layanan system komunikasi intra pemerintah kabupaten.
c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria penyelenggaraan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK pemerintah kabupaten layanan internet dan pengguna akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generic, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan

manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan public dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government, layanan system komunikasi intra pemerintah kabupaten;

d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK pemerintah kabupaten layanan internet dan pengguna akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generic, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e – Government, integrasi layanan public dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government layanan system komunikasi intra pemerintah kabupaten.

e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK pemerintah kabupaten layanan internet dan pengguna akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generic, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan public dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi e-Govemment, layanan system komunikasi intra pemerintah kabupaten;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Aplikasi Informatika membawahi subkoor :

1. Subkoor Infrastruktur Jaringan TIK
2. Subkoor Pengembangan E- Goverment
3. Subkoor Keamanan Informasi dan Persandian

4. Bidang Sumber Daya TIK, Data dan Statistik Daerah (SD TIK)

Bidang Sumber Daya TIK, Data dan Statistik mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengembangan sumber daya TIK pemerintah kabupaten dan masyarakat, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi public, penyelenggaraan *goverment chief information officer* (GCIO) pemerimtah kabupaten, penyelenggaraan ekosistem TIK smart city di kabupaten,

pengolahan data elektronik dan statistik sebagai bahan evaluasi, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara makro;

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud Bidang Sumber Daya TIK, Data dan Statistik mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan Penyusunan Program kerja bidang Sumber daya TIK, data dan statistik;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya TIK pemerintah kabupaten dan masyarakat, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi public, penyelenggaraan government chief information officer (GCIO) pemerintah kabupaten, penyelenggaraan ekosistem TIK smart city di kabupaten, pengolahan data elektronik dan statistik sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara makro;
c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya TIK pemerintah kabupaten dan masyarakat, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi public, penyelenggaraan government chief information officer (GCIO) pemerintah kabupaten, penyelenggaraan ekosistem TIK smart city di kabupaten, pengolahan data elektronik dan statistik sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara makro;
d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria penyelenggaraan di bidang pengembangan sumber daya TIK pemerintah kabupaten dan masyarakat, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi public, penyelenggaraan government chief information officer (GCIO) pemerintah kabupaten, penyelenggaraan ekosistem TIK smart city di kabupaten, pengolahan data elektronik dan statistik sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara makro;
e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penguatan kapasitas sumber daya komunikasi public,

penyelenggaraan government chief information officer (GCIO) pemerintah kabupaten, penyelenggaraan ekosistem TIK smart city di kabupaten, pengolahan data elektronik dan statistik sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembanguna secara makro;

f. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan kapasitas sumber daya komunikasi public, penyelenggaraan government chief information officer (GCIO) pemerintah kabupaten, penyelenggaraan ekosistem TIK smart city di kabupaten, pengolahan data elektronik dan statistic sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan; dan

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sumber Daya TIK dan Statistik membawahi subkoor :

1. SubKoor Sumber Daya TIK
2. SubKoor Ekosistem TIK
3. SubKoor Data dan statistik

2.2 Sumber Daya Dinas Kominfo Kabupaten Bangkalan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh berbagai sumber daya antara lain; sumber daya aparatur (SDM), sumber daya TIK, serta sarana dan prasarana. Berikut ini akan disampaikan uraian terkait sumber daya-sumber daya sebagai Input dalam pelaksanaan tugasnya.

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Jumlah aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan sebanyak 112 orang. Dari sejumlah tersebut masih belum memenuhi kualifikasi teknis bidang komunikasi dan informatika. Susunan kepegawaian berdasarkan tingkat pendidikan, kualifikasi teknis pegawai dan jumlah pegawai yang tersebar di bidang bidang:

Tabel 2.1

Susunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Tingkat Pendidikan tertera pada

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	S-3	0
2	S-2	6
3	S-1	34
4	D-III	4
5	SLTA/SMU	16
6	SLTP	0
	JUMLAH	**60**

Sumber : Diskominfo Tahun 2024

Tabel 2.2

Susunan Tenaga Harian Lepas (THL)Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	S-2	
2	S-1	13
3	D-III	
4	D-II	
5	D-I	
6	SLTA	33
7	SLTP	1
	JUMLAH	**47 Orang**

Sumber : Diskominfo Tahun 2024

Tabel 2.3

Susunan Pegawai di Unit Pelayanan

No	**Unit Kerja**	**PNS**	**THL**	**Jumlah**
1	Radio SBFM	5	2	7
2	Desk PPID	2	8	10
3	Website PPID	1	-	1
4	SP4N-Lapor	2	-	2
5	Sosial Media	4	-	4
Jumlah		**14**	**10**	**24**

Sumber : Diskominfo Tahun 2024

Tabel 2.4

Data Kualifikasi Teknis Pegawai

N o	**Kualifikasi**	**Yang ada**	**Jumlah ideal**	**Kurang**
1	S-1 Informatika	2	30	28
2	S-1 Komunikasi/Broadcast	-	20	20
3	S-1 Elektro	1	10	9
	JUMLAH	**3**	**60**	**57**

Sumber : Diskominfo Tahun 2024

2.2.2 Aset/Modal

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan tidak hanya mengandalkan jumlah dan kualitas SDM Aparatur. Pelaksanaan tugas dan fungsi juga menuntut tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan organisasi. Sedangkan prasarana adalah segala yang merupakan penunjang terselenggaranya suatu proses atau usaha agar tujuan organisasi tercapai. Secara umum sarana dan prasarana digunakan antara lain untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan informasi dan komunikasi, informasi telematika, serta penunjang pelksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan.

Sarana dan prasarana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan diantaranya :

1. Server dengan kapasitas 6 tera (setara 6000 Gb);
2. Bandwidth 800 MBps;
3. Menara NOC Jaringan intra pemda
4. Radio Suara Bangkalan FM 92,1 MHz;
5. Desk PPID Pemerintah Kabupaten Bangklalan;
6. Billboard/Media Luar Ruang;
7. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
8. Tabloid Lensa Madura;
9. Media Online

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Bangkalan

Sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), pengukuran kinerja merupakan tahapan penting untuk membandingkan target dan hasil yang diperoleh setelah melaksanakan program dan kegiatan. Hasil pengukuran kinerja pelayanan yang kemudian dituangkan dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)

untuk mengukur seberapa besar capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan informasi tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Suatu Perangkat Daerah dikatakan berhasil dalam mencapai sasaran strategisnya adalah dengan melihat persentase nilai tingkat pencapaian indikator kinerjanya. Selain itu, dapat juga dilihat dengan membandingkan kinerja dengan tahun – tahun sebelumnya. Berdasarkan tabel 2.1 terdapat 3 indikator kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Renstra 2018 - 2023. Yang pertama adalah persentase layanan akses internet, intranet dan komunikasi intra Pemerintah Daerah mencapai 70%. Kedua adalah persentase jumlah berita dipublikasikan mencapai 100% yang mana telah memenuhi target capaian tahun 2023. Ketiga adalah persentase jumlah data statistik sektoral yang dihasilkan dengan capaian 60% di tahun 2023.

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan diatas, berikut disampaikan pula pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam tabel 2.1 dan 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan

No.	Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi urusan Komunikasi dan Informatika, Statistisk dan Persandian	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian					Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2025	2026	
1	**Tersedianya infrastruktur jaringan TIK untuk akses intra Pemerintah Daerah**															
a	Persentase layanan akses internet, intranet, dan komunikasi intra Pemerintah Daerah			100%	100%	100%	60%	70%	100%	100%	100%	82,51%	70			
2	**Terselenggaranya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah**															
a	Persentase jumlah berita dipublikasikan			100%	100%	100%	90%	100	100%	100%	100%	56,22%	100			
3	**Tersedianya statistik daerah**															
a	Prosentase Jumlah data statistik sektoral yg dihasilkan			100%	100%	100%	55%	60	100%	100%	100%	29%	60			
4	**Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan**															
a	Indeks kepuasan pelayanan internal kesekretariatan			100	100	100	83	85	100	100	100	83,72	85			

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Diskominfo Kabupaten Bangkalan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan									
																	Anggaran					Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)					(18)				
Program Pelayanan Kesekretariatan	**Prosentase terpenuhinya layanan kesekretariatan**	**2.733.853.050,00**	**1.762.497.008,50**				**2.433.663.106,00**	**1.634.306.108,00**				**89,02**	**92,73**					**(35,53)**					**(32,85)**			
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Jumlah jenis barang perkantoran yang disediakan	250.856.700,00	100.295.595,50				1.420.641.916,00	1.446.749.244,00																		
	Jumlah jenis jasa perkantoran yang disediakan	1.378.959.850,00	1.455.127.000,00																							
Kedinasan dalam daerah dan luar daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan	5.000.000,00	-				250.665.088,00	39.015.313,00																		
	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan	275.797.100,00	39.015.313,00																							
Pengelolaan dan penatalaksanaan barang milik daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang tersusun	9.830.000,00	6.575.000,00				7.910.000,00	6.575.000,00																		
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah jenis sarana aparatur yang dipelihara	94.440.000,00	54.339.000,00				188.545.402,00	54.971.451,00																		
	Jumlah prasarana aparatur yang	115.000.000,00	5.000.000,00																							

	dipelihara																								
Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan	-	47.995.100,00					47.995.100,00																	
	Jumlah prasarana aparatur yang diadakan	310.743.500,00	-				288.199.200,00																		
Peningkatan disiplin pegawai	Jumlah pakaian aparatur dan kelengkapan yang diadakan	100.000.000,00	-				93.000.000,00																		
Peningkatan kapasitas aparatur	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Aparatur	95.892.500,00	-				95.594.000,00																		
Penyusunan perencanaan dan informasi PD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	25.384.650,00	9.400.000,00				34.474.000,00	15.050.000,00																	
	Jumlah dokumen penganggaran yang disusun	10.250.750,00	9.150.000,00																						
	Jumlah dokumen data dan informasi	250.000,00	6.200.000,00																						
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja PD	Jumlah laporan triwulanan & semesteran monev PD yang tersusun (APBD, Renja/RKPD)	11.430.500,00	13.500.000,00				22.299.500,00	16.900.000,00																	
	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD yang tersusun	11.629.250,00	7.900.000,00																						
Penyusunan laporan keuangan	jumlah laporan keuangan PD yang tersusun mingguan/bulanan/triwulan/semester	-	8.000.000,00					7.050.000,00																	

	jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	8.388.250	-				8.334.000,00																		
Fasilitasi peringatan hari jadi Kabupaten / Provinsi	Peringatan hari jadi Kota Bangkalan	30.000.000	-				24.000.000,00																		
Program penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik	**Prosentase terintegrasinya sub domain dengan domain resmi pemerintah**	**1.207.397.200,00**	**1.065.434.000,00**				**1.152.774.393,00**	**1.028.239.000,00**				**95,48**	**96,51**										**(10,80)**		
pengembangan, pengawasan dan pengendalian infrastruktur jaringan TIK	jumlah website resmi yang dikelola	141.750.000,00	96.000.000,00				1.014.784.516,00	928.350.000,00																	
	jumlah jaringan yang terpasang	886.200.000,00	830.845.000,00																						
	jumlah menara telekomunikasi yang diawasi dan dikendalikan	36.600.000,00	38.700.000,00																						
pembinaan dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan informasi layanan publik	Jumlah aplikasi/sistem informasi yang tersedia	97.737.100,00	92.475.000,00				94.437.100,00	92.475.000,00																	
pengelolaan keamanan informasi dan persandian	Jumlah SDM bidang keamanan informasi	37.477.600,00	-				43.552.777,00	7.414.000,00																	
	Jumlah operasional pengelolaan keamanan informasi	7.632.500,00	7.414.000,00																						

Program pengembangan informasi dan komunikassi publik	**jumlah konten informasi yang disiarkan melalui jaringan radio**	**2.013.204.750,00**	**2.053.080.850,00**				**1.914.093.550,00**	**1.988.807.498,00**				**95,08**	**96,87**										**3,90**			
pengelolaan informasi publik	terpilihnya komisioner komisi informasi masa bakti 2019-2023	239.950.000,00	-				269.035.446,00	20.655.000,00																		
	jumlah issue yang berhasil diangkat	21.506.000,00	6.750.000,00																							
	jumlah permohonan data dan informasi yang ditindak lanjuti	45.302.500,00	12.100.000,00																							
	jumlah pembinaan KIM	-	-																							
fasilitasi hari-hari besar nasional	jumlah momentum peringatan hari besar nasional yang tersaji kepada masyarakat	163.600.000,00	87.612.500,00				163.100.000,00	87.612.500,00																		
pengelolaan komunikasi publik	jumlah pameran yang diikuti	54.775.000,00	-				757.410.909,00	1.277.773.998,00																		
	jumlah informasi yang di expose	-	133.800.000,00																							
	jumlah pertunjukan rakyat yang dilaksanakan	24.381.250,00	-																							
	jumlah wartawan yang diundang untuk sinkronisasi	683.090.000,00	1.103.320.350,00																							
	jumlah media luar ruang yang dikembangkan dan dipelihara	15.000.000,00	90.000.000,00																							

pengelolaan dan operasional komisi informai	operasional komisi informasi	430.310.000,00	474.524.000,00				403.294.000,00	470.372.000,00																		
pengelolaan media komunikai	jumlah siaran keliling, penyebaran brosur disebarkan	7.150.000,00	-				321.253.195,00	132.394.000,00																		
	jumlah kebijakan yang diinformasikan pada masyarakat	40.550.000,00	-																							
	jumlah lensa madura yang diterbitkan	108.990.000,00	29.600.000,00																							
	jumlah konten informasi yang disiarkan melalui jaringan radio	109.100.000,00	112.894.000,00																							
	kajian akademis LPPL	69.500.000,00	-																							
Program pengembangan sumber daya TIK dan statistik daerah	**jumlah jenis data statistik yang tersedia**	**227.195.000,00**	**131.578.800,00**				**217.074.900,00**	**130.890.000,00**				**95,55**	**99,48**										**(39,70)**			
pengembangan sumber daya TIK	jumlah komunitas relawan TIK	43.000.000,00	-				65.000.000,00	17.550.000,00																		
	Jumlah aparatur peserta pelatihan survey	22.000.000,00	17.550.000,00																							
pengembangan ekosistem TIK	jumlah operator TIK yang mendapatkan pembinaan dan pelatihan	34.672.500,00	-				62.095.000,00	27.370.000,00																		
	jumlah aparatur yang memahami tata kelola sistem pemerintahan berbasis	27.522.500,00	27.370.000,00																							

	elektronik																									
penyusunan dan pengelolaan data dan statistik	dokumen metadata dan statistik sektoral daerah yang tersajikan	100.000.000,00	86.658.800,00				89.979.900,00	85.970.000,00																		
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	**Prosentase terintegrasinya sub domain dengan domain resmi pemerintah**			**1.933.682.495,00**	**3.939.448.150,00**	**1.600.000.000,00**			**1.823.942.425,00**	**3.538.242.004,00**	**1.590.441.000,00**			**94,32**	**89,82**	**99,40**				**103,73**	**(59,39)**				**93,99**	**(55,05)**
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksanaanya pengelolaan portal web resmi**			**1.929.626.995,00**	**3.750.648.150,00**	**1.500.000.000,00**			**1.820.285.675,00**	**3.357.090.475,00**	**1.496.000.000,00**															
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah			1.929.626.995,00		1.500.000.000,00			1.820.285.675,00																	
penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kab/kota	jumlah jaringan yang terpasang				3.750.648.150,00					3.357.090.475,00	1.496.000.000,00															
	jumlah lisensi aplikasi yg dihasilkan																									
	jumlah menara telekomunikas																									

	i yang diawasi dan dikendalikan																								
	jumlah perangkat yg dihasilkan																								
	jumlah website resmi yang dikelola																								
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	**Pengembangan aplikasi informatika**			**4.055.500,00**	**188.800.000,00**	**100.000.000,00**			**3.656.750,00**	**181.151.529,00**	**94.441.000,00**														
penatalaksanaan dan pengawasan e-goverment dalam penyelenggaraan pemrintah daerah Kab/Kota	jumlah aplikasi yg dihasilkan			4.055.500,00	188.800.000,00	-			3.656.750,00	181.151.529,00	-														
	sosialisasi aplikasi integrasi																								
pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan			-	-	100.000.000,00			-	-	94.441.000,00														
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	**Prosentase pengamanan informasi persandian**			**25.498.750,00**	**171.072.000,00**	**39.570.000,00**			**10.366.400,00**	**165.465.462,00**	**39.464.900,00**			**40,65**	**96,72**	**99,73**				**570,90**	**(76,87)**				**1.496,17**	**(76,15)**
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/	**Terlaksanaanya keamanan informasi**			**25.498.750,00**	**171.072.000,00**	**39.570.000,00**			**10.366.400,00**	**165.465.462,00**	**39.464.900,00**														

Kota																									
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			5.498.750,00	-	-			5.498.400,00	-	-														
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi			20.000.000,00	171.072.000,00	39.570.000,00			4.868.000,00	165.465.462,00	39.464.900,00														
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	**Persentase jumlah berita dipublikasikan**			**2.764.753.150,00**	**2.595.734.464,00**	**1.624.664.000,00**			**2.673.435.000,00**	**2.500.728.481,00**	**1.610.905.595,00**			**96,70**	**96,34**	**99,15**				**(6,11)**	**(37,41)**				**(6,46)**	**(35,58)**
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah Kegiatan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			**2.764.753.150,00**	**2.595.734.464,00**	**1.624.664.000,00**			**2.673.435.000,00**	**2.500.728.481,00**	**1.610.905.595,00**														
Monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	jumlah mediia sosial yg dilaksanakan dan dipelihara			1.875.992.150,00	1.697.208.384,00	1.100.000.000,00			1.838.605.000,00	1.674.838.681,00	1.099.750.000,00														
	jumlah wartawan yang diundang untuk sinkronisasi																								

Penyelenggaraan hubungan masyarakat media dan kemitraan komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan			-	-	-					-															
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik			445.241.000,00	388.799.950,00	174.664.000,00			434.741.000,00	388.569.500,00	174.260.000,00															
Manajemen komunikasi krisis	jumlah issue yang berhasil diangkat			-	20.000.000,00	-			-	18.300.000,00	-															
	jumlah permohonan data dan informasi yang ditindak lanjuti																									
Pelayanan informasi publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik			-	-	-			-		-															
Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah			443.520.000,00	489.726.130,00	350.000.000,00			400.089.000,00	419.020.300,00	336.895.595,00															
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	**Persentase Jumlah data statistik sektoral yg dihasilkan**			**125.000.000,00**	**111.759.650,00**	**1.230.000,00**			**124.650.000,00**	**97.422.775,00**	**870.000,00**			**99,72**	**87,17**	**70,73**				**(10,59)**	**(98,90)**				**(21,84)**	**(99,11)**
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/	**Jumlah Kegiatan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah/ Kabupaten Kota**			**125.000.000,00**	**111.759.650,00**	**1.230.000,00**			**124.650.000,00**	**97.422.775,00**	**870.000,00**															

Kota																									
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			75.000.000,00	20.104.650,00	-			74.700.000,00	12.397.450,00	-														
Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi			-	34.560.850,00	1.230.000,00				31.746.325,00	870.000,00														
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS			50.000.000,00	57.094.150,00	-			49.950.000,00	53.279.000,00	-														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan**			**7.703.256.285,00**	**7.552.138.982,00**	**6.241.216.428,00**			**7.400.210.047,00**	**7.185.251.628,00**	**6.110.745.454,00**			**96,07**	**95,14**	**97,91**				**(1,96)**	**(17,36)**				**(2,90)**	**(14,95)**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**5.578.200,00**	**37.812.100,00**	**9.013.000,00**			**4.985.750,00**	**30.584.250,00**	**8.813.000,00**														
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2.000.000,00	11.906.300,00	3.192.000,00			1.773.000,00	9.585.000,00	2.992.000,00														

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			818.000,00	4.603.250,00	2.856.000,00			696.000,00	4.563.500,00	2.856.000,00															
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			500.000,00	5.863.250,00	-			498.750,00	5.143.500,00	-															
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			760.200,00	4.051.250,00	2.965.000,00			711.000,00	3.351.500,00	2.965.000,00															
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			500.000,00	4.267.150,00	-			416.000,00	3.916.000,00	-															
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi			500.000,00	3.762.650,00	-			391.000,00	1.857.500,00	-															

	Kinerja SKPD																								
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			500.000,00	3.358.250,00	-			500.000,00	2.167.250,00															
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**			**3.991.957.423,00**	**4.590.146.662,00**	**4.807.048.644,00**			**3.954.351.764,00**	**4.522.605.767,00**	**4.753.646.524,00**														
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			3.990.457.423,00	4.581.050.812,00	4.806.898.644,00			3.953.592.764,00	4.514.360.767,00	4.753.500.524,00														
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			750.000,00	6.674.800,00	150.000,00			509.000,00	6.611.000,00	146.000,00														
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			750.000,00	2.421.050,00	-			250.000,00	1.634.000,00	-														
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang**			**-**	**2.290.000,00**	**-**			**-**	**2.264.000,00**	**-**														

Daerah	**tersusun**																								
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			-	2.290.000,00	-			-	2.264.000,00	-														
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**			**1.543.401.973,00**	**473.378.100,00**	**-**			**1.374.318.994,00**	**440.089.700,00**	**-**														
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			-	64.341.100,00	-			-	49.420.850,00	-														
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			103.268.423,00	-	-			102.705.000,00	-	-														
Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			1.440.133.550,00	409.037.000,00	-			1.271.613.994,00	390.668.850,00	-														
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			-	-	-					-														
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**68.501.667,00**	**213.827.200,00**	**30.263.652,00**			**50.581.735,00**	**184.535.543,00**	**30.158.250,00**														

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			702.000,00	13.568.100,00	4.861.560,00			702.000,00	13.568.100,00	4.843.200,00														
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			6.658.450,00	31.376.900,00	9.180.800,00			6.514.700,00	31.336.800,00	9.180.000,00														
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			24.932.132,00	17.085.000,00	5.525.000,00			7.293.950,00	17.056.800,00	5.518.800,00														
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			11.220.000,00	23.168.300,00	8.676.292,00			11.220.000,00	23.159.200,00	8.676.250,00														
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			6.960.000,00	8.100.000,00	2.020.000,00			6.840.000,00	6.960.000,00	1.940.000,00														
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			18.029.085,00	120.528.900,00	-			18.011.085,00	92.454.643,00	-														
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**			**209.280.250,00**	**222.869.870,00**	**-**			**207.665.745,00**	**220.919.870,00**	**-**														
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			-	21.813.870,00	-			-	21.813.870,00	-														
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung			209.280.250,00	201.056.000,00	-			207.665.745,00	199.106.000,00	-														

Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan																								
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**1.652.792.903,00**	**1.621.305.000,00**	**1.394.891.132,00**			**1.605.976.226,00**	**1.435.340.384,00**	**1.318.127.680,00**														
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.966.000,00	12.500.000,00	6.500.000,00			3.966.000,00	10.992.000,00	5.920.000,00														
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			155.000.000,00	200.000.000,00	217.155.132,00			138.192.605,00	187.820.226,00	210.896.176,00														
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1.493.826.903,00	1.408.805.000,00	1.171.236.000,00			1.463.817.621,00	1.236.528.158,00	1.101.311.504,00														
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**			**231.743.869,00**	**390.510.050,00**	**-**			**202.329.833,00**	**348.912.114,00**	**-**														
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			150.977.569,00	197.910.000,00	-			121.883.833,00	157.902.623,00	-														

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			65.116.300,00	162.770.050,00	-			64.896.000,00	161.519.491,00	-															
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			15.650.000,00	29.830.000,00	-			15.550.000,00	29.490.000,00	-															

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

No	Bidang	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran
1	Sekretariat	Pelayanan administrasi, perencanaan dan keuangan, umum dan kepegawaian serta sarana dan prasarana	Semua Bidang-bidang lingkup Diskominfo Kabupaten Bangkalan;
			Instansi Vertikal;
			Pegawai lingkup Diskominfo Kab. Bangkalan;
			Masyarakat
2	Aplikasi Informatika	Pelayanan infrastruktur jaringan TIK, Pengembangan E-Government, Keamanan Informasi dan Persandian	Diskominfo, SKPD Lingkup Kabupaten Bangkalan
			Masyarakat
3	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi publik, pengelolaan komunikasi publik dan pengelolaan media komunikasi publik	Diskominfo
			PWI
			Masyarakat
4	Sumber Daya TIK	Pelayanan sumber daya TIK, Ekosistem TIK, Data dan statistik	Diskominfo, SKPD Lingkup Kabupaten Bangkalan, Masyarakat

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Permasalahan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika adalah terjadinya kesenjangan antara hasil kinerja yang dicapai dengan yang direncanakan dan yang ingin dicapai pada masa datang. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, berikut hasil rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan bidang kominfo yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan ini dipetakan menjadi masalah pokok, masalah, dan akar masalah, seperti pada tabel berikut :

Table 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Pelayanan informasi belum memenuhi harapan masyarakat.	1. Kualitas infrastruktur jaringan TIK untuk akses intra dan internet Pemerintah Daerah yang masih perlu ditingkatkan. 2. Perangkat daerah belum konsisten untuk mengisi konten website sebagai upaya penyebarluasan informasi 3. Pelayanan Publik dan media informasi belum sepenuhnya berbasis TIK.	1. Keterbatasan anggaran yang berbasis TIK di Diskominfo. 2. Kurangnya koordinasi terhadap PD dalam hal penyebarluasan informasi. 3. Pengembangan pelayanan yang masih belum sepenuhnya dilaksakan.
2	Kinerja sebagai *regulator* dan *integrator* TIK dalam penerapan SPBE untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dan berintegritas tinggi belum optimal.	1. Rendahnya pengetahuan ASN tentang pentingnya peran TIK dalam pemerintahan. 2. Belum terpenuhinya infrastruktur dasar TIK sebagai syarat penerapan SPBE.	1. Belum dilakukan program pelatihan *softskill* terkait *transformasi leadership*. 2. Dukungan terhadap ketersediaan infrastruktur TIK masih rendah.
3	Peran sebagai penyedia data atau wali data sektoral belum terwujud	Kesenjangan data yang tersedia dengan data yang dibutuhkan	1. Perubahan alur penyedia data disebabkan otonomi. 2. Ego Sektoral.

3.2 Telaahan Renstra Kementerian dan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur

Pada telaahan ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang

mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Identifikasi faktor tersebut dapat disusun pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Diskominfo Kabupaten Bangkalan berdasarkan Sasaran Renstra Kemkominfo dan Renstra Diskominfo Provinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemkominfo	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Jawa Timur	Permaslahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	2		3	4	5
1 2 3	Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih dan efektif	1.Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dan layanan informasi publik 2.Meningkatnya manajemen TIK menuju East Java Smart Province 3. Meningkatnya ketersediaan data statistik pembangunan provinsi yang dipublikasikan	1. Kualitas infrastruktur jaringan TIK untuk akses intra Pemerintah Daerah yang masih perlu ditingkatkan 2. Perangkat daerah belum konsisten untuk mengisi konten website sebagai upaya penyebarluasan informasi 3. Pelayanan Publik dan media informasi belum sepenuhnya berbasis TIK	1. Keterbatasan anggaran yang berbasis TIK di Diskominfo 2. Kurangnya koordinasi terhadap PD dalam hal penyebarluasan informasi 3. Pengembangan pelayanan yang masih belum sepenuhnya dilaksanakan	1. Perkembangan teknologi dan informasi 2. Kebijakan pemerintah untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan Diskominfo 3. Telah dikembangkan Integrasi Jaringan semua OPD melalui jaringan internet/intranet serta pengembangan sistem informasi secara online melalui website

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Bangkalan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan, Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah tetapi sangat signifikan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Bergulirnya Revolusi Industry 4.0. telah merubah tatanan dunia termasuk Indonesia. Dampaknya terjadi semangat dan inisiatif untuk merubah birokrasi pemerintah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK). Melalui TIK beberapa daerah kabupaten/kota di Indonesia terbukti mampu menyajikan proses administrasi lebih efektif dan efisien serta mampu menyajikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. *Trend* pembangunan Kota Cerdas (*Smart City*), Kabupaten Cerdas (*Smart District*), Desa Cerdas (*Smart Village*) bahkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mencanangkan Provinsi Cerdas dengan program *East Java Smart Province* adalah wujud dari kreatifitas dan inovasi yang bertujuan memberikan kenyamanan dan layanan prima kepada masyarakat dengan bantuan TIK.

Diantara teknologi masa depan yang dapat mempengaruhi perkembangan pemanfaatan TIK di pemerintahan diantaranya :

1. *Mobile Internet* merupakan akses internet yang menggunakan gawai personal. Dengan semakin meningkatnya pengaksesan internet melalui gawai personal, maka layanan pemerintah harus dapat diakses oleh masyarakat pengguna dalam bentuk layanan bergerak tanpa batas waktu dan lokasi.
2. *Cloud Computing* merupakan teknologi layanan berbagi pakai yang dapat diakses melalui internet untuk memberikan layanan data, aplikasi, dan infrastruktur kepada pengguna. Teknologi ini memberikan efektifitas dan efisiensi yang tinggi untuk melakukan integrase TIK.
3. *Internet of Things* (*IoT*) merupakan perangkat elektronik yang dilengkapi dengan perangkat lunak, sensor, actuator, dan konektivitas internet sehingga mampu melakukan pengiriman atau pertukaran data melalui

akses internet. Dengan semakin meningkatnya pemanfaatan IoT dalam kehidupan sehari-hari, layanan pemerintah diharapkan bersifat adaptif dan responsive terhadap kebutuhan kustomisasi layanan yang diinginkan oleh masyarakat pengguna.

4. *Big Data Analytics* merupakan teknologi analisis terhadap data yang berukuran sangat besar, tidak terstruktur, tidak berpola, korelasi ataupun relasi antar data. Dengan teknologi ini diharapkan mampu memberikan dukungan pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
5. *Artificial Intelligence* (*AI*) merupakan teknologi kecerdasaan buatan pada mesin yang memiliki fungsi kognitif untuk melakukan pembelajaran dan pemecahan masalah sebagaimana halnya dilakukan oleh manusia. Pemanfaatan *AI* berpotensi membantu pemerintah mengurangi beban administrasi seperti mengisi dokumen, mencari dokumen, menerjemahkan tulisan/suara, dan membuat draf dokumen.

Selain itu dampak kemajuan teknologi informasi telah memunculkan kesadaran warga negara terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan sehingga pemerintah merespon dengan kebijakan bahwa setiap K/L/D wajib menyajikan informasi yang menjadi ranah publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Secara internal birokrasi pemerintah telah bertransformasi dalam beberapa proses bisnis, seperti proses perencanaan dan penganggaran yang dilakukan secara elektronik, perijinan online, pengaduan online, dan beberapa proses bisnis lainnya telah dilakukan secara online. Hal ini diperkuat dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Melalui SPBE pemerintah berharap pada akhir tahun 2025 ada keterpaduan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dengan keterpaduan maka akan menciptakan proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi sehingga akan terbentuk satu

kesatuan pemerintahan yang utuh dan menyeluruh serta menghasilkan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan berkewajiban untuk menyediakan infrastruktur dasar TIK, mendorong terciptanya ekosistem TIK, serta bersama-sama dengan Bagian Organisasi membangun tata kelola SPBE.

Khusus yang bersentuhan dengan RT/RW terkait tugas tambahan sebagai Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagai konsekuensi dari Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum, Dinas Kominfo Kabupaten Bangkalan telah memberlakukan sistem informasi *cellplan* sebagai alat kendali dan pengawasan. Selain itu untuk memenuhi kebutuhan jaringan internet yang masih berbasis nirkabel dibutuhkan ruang untuk pembangunan tower monopole. Pada waktu mendatang perlu ditingkatkan dengan penggunaan *fiberoptik* yang juga memerlukan pemanfatan RT/RW.

3..4 Penentuan Isu - Isu Strategis

Penentuan isu strategis menjadi bagian yang mutlak dalam suatu proses perencanaan. Kemampuan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat akan membuat perencanaan yang disusun menjadi tepat sasaran, efektif, diterima oleh pihak terkait serta dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan analisis lingkungan strategis pada permasalahan pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Bangkalan, telaahan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati, telaahan Renstra Kementerian/lembaga maka dapat disusun isu- isu strategis Dinas Kominfo Kabupaten Bangkalan, sebagai berikut :

3.4.1 Isu - Isu Bidang Sumber Daya Manusia

a. SDM aparatur yang ada belum memiliki kepemimpinan (*leadership commitment*) yang memadahi untuk melaksanakan SPBE. Belum bersungguh-sungguh meninggalkan kepemimpinan ego sectoral serta belum bersinergi agar bersama-sama memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Sementara SPBE memerlukan keterpaduan dan keterhubungan antar semua perangkat daerah untuk membangun satu kesatuan pemerintahan yang utuh.

Akibatnya SPBE belum dapat diterapkan dan dimanfaatkan secara optimal.

b. SDM aparatur belum memiliki kompetensi teknis yang dibutuhkan dalam menerapkan SPBE antara lain di bidang perencanaan, rekayasa proses bisnis pemerintahan, pengelolaan TIK yang terintegrasi, keamanan dan keandalan informasi, pengelolaan layanan yang inovatif, adaptif, dan responsif.

c. SDM aparatur belum memiliki kompetensi teknis untuk pengelolaan dan penyediaan konten informasi bahan diseminasi seperti di bidang multimedia, desain grafis, jurnalistik, serta dasar - dasar ilmu komunikasi lainnya.

3.4.2 Isu - Isu Bidang Suprastruktur dan Infrastruktur

a. *Data Center* dan *Disaster Recovery Center* belum memenuhi kapasitas maksimal untuk menjamin peran selaku integrator bagi keberlangsungan pelayanan pengguna SPBE baik intra pemerintah maupun masyarakat.

b. Media informasi yang tersedia belum mampu menjangkau keseluruhan masyarakat Kabupaten Bangkalan sehingga masih terjadi kesenjangan informasi khususnya tentang informasi penyelenggaraan pemerintahan di tengah derasnya arus informasi yang tersaji oleh berbagai media social.

c. Penyediaan Data Sektoral sebagai dasar analisis kebijakan atau pengambilan keputusan masih terjadi kesenjangan antara data yang tersedia dengan data yang dibutuhkan. Hal ini terjadi sebagai akibat lemahnya sinergitas dan kerjasama antar perangkat daerah dalam memanfaatkan sumber daya bersama.

d. Kapasitas Bandwidth yang masih tergolong kecil berpengaruh pada distribusi jaringan yang mana jangkauan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika tidak sampai ke desa – desa.

e. Keterbatasan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika

khususnya dalam penyediaan jasa komunikasi, sember daya air dan listrik.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam RPD Tahun 2024 - 2026 telah ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang menjadi urusan/kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan yaitu **Indeks SPBE**.

Penetapan indeks SPBE sebagai salah satu indikator kinerja sasaran sejalan dengan tujuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sedangkan untuk instrumen evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Struktur penilaian Indeks SPBE terdiri dari 4 (empat) domain, 8 (delapan) aspek serta 47 (empat puluh tujuh) indikator sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1.1
Domain, Aspek, Indikator, Pembobotan SPBE

DOMAIN	ASPEK	INDIKATOR	BOBOT
Kebijakan Internal SPBE	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	10	13%
Tata Kelola SPBE	Perencanaan Strategis SPBE	4	10%
	Teknologi Informasi dan Komunikasi	4	10%
	Penyelenggara SPBE	2	5%
Manajemen SPBE	Penerapan Manajemen SPBE	8	12%
	Pelaksanaan Audit TIK	3	4,50%
Layanan SPBE	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	10	27,50%
	Layanan Publik Berbasis Elektronik	6	18%

Indikator adalah informasi spesifik dari aspek penyelenggaraan SPBE yang diukur dan dinilai untuk tingkat kematangannya. Sedangkan tingkat kematangan SPBE merupakan kerangka kerja yang mengukur derajat pengembangan SPBE ditinjau dari tahapan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1.2
Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Proses

Tingkat	Kriteria
1. Rintisan	• Proses penerapan SPBE dilakukan tanpa perencanaan dan sewaktu-waktu.
2. Terkelola	• Kriteria tingkat Rintisan telah terpenuhi
	• Proses penerapan SPBE sudah dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen dan diterapkan pada sebagian unit kerja dalam organisasi.
3. Terdefinisi	• Kriteria tingkat Terkelola telah terpenuhi
	• Proses penerapan SPBE sudah dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen yang sesuai pedoman/standar dan diterapkan pada semua unit kerja dalam organisasi
4. Terpadu dan Terukur	• Kriteria tingkat Terdefinisi telah terpenuhi
	• Proses penerapan SPBE yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE
5. Optimum	• Kriteria tingkat Terpadu dan Terukur telah terpenuhi.
	• Proses penerapan SPBE telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi

Tabel 4.1.3
Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Layanan

Tingkat	Kriteria
1.Informasi	• Layanan SPBE diberikan dalam bentuk informasi satu arah
2.Interaksi	• Kriteria Tingkat Informasi telah terpenuhi
	• Layanan SPBE diberikan dalam bentuk interaksi dua arah
3.Transaksi	• Kriteria Tingkat Interaksi telah terpenuhi
	• Layanan SPBE diberikan melalui satu kesatuan transaksi operasi dengan menggunakan beberapa sumber daya SPBE
4.Kolaborasi	• Kriteria Tingkat Transaksi telah terpenuhi
	• Layanan SPBE diberikan melalui integrasi/kolaborasi dengan layanan SPBE lain
5.Optimum	• Kriteria Tingkat Kolaborasi telah terpenuhi
	• Layanan SPBE telah dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas menyesuaikan perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal.

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika beserta penjabaran kinerja dan juga target (*cascading)* Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 - 2026 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD Diskominfo

Tujuan						Sasaran						Ket.
Uraian	Indikator Kinerja	target				Uraian	Indikator Kinerja	target				
		2024	2025	2026	Transisi 2027			2024	2025	2026	Transisi 2027	
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi komunikasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,5 B	2,75 B	3 B	3 B	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	18%	20%	22%	22%	
						Meningkatnya Pelayanan Penyebarluasan Informasi yang tepat dan akurat	Persentase OPD yang menerapkan keterbukaan informasi publik	100%	100%	100%	100%	
							Persentase keamanan informasi pemerintah daerah	22%	44%	88%	88%	
							Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	22%	50%	75%	75%	
						Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan komunikasi dan Informatika	Nilai Sakip PD	60	61	62	62	
							Indeks kepuasan masyarakat	85	87	90	90	

4.2 CASCADING KINERJA PERANGKAT DAERAH

NO	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME (INDIKATOR PROGRAM)	OUTPUT (INDIKATOR KEGIATAN)	OUTPUT (INDIKATOR SUB KEGIATAN)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN							
						2023		2024		2025		2026	
						KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**					**2,25**		**2,50**		**2,75**		**3,00**	
		Nilai Sakip PD				**60**		**60**		**61**		**62**	
		Indeks kepuasan masyarakat				**83**		**85**		**87**		**90**	
			Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintah daerah			**85**	**6.421.430.400**	**85**	**6.722.794.989**	**87**	**6.987.253.194**	**90**	**6.987.253.194**
				Persentase tersusunnya Perencanaan, penganggaran dan evauasi kinerja perangkat daerah		**100%**	**27.492.500**	**100%**	**2.159.000**	**100%**	**6.475.000**	**100%**	**6.475.000**
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	5.642.000	3 dokumen	299.250	3 dokumen	720.000	3 dokumen	720.000

					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	3.629.500	1 dokumen	160.000	1 dokumen	1.500.000	1 dokumen	1.500.000
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	3.692.000	1 dokumen	362.000	1 dokumen	1.500.000	1 dokumen	1.500.000
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	3.606.000	1 dokumen	233.750	1 dokumen	500.000	1 dokumen	500.000
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	3.731.000	1 dokumen	375.000	1 dokumen	500.000	1 dokumen	500.000
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	4.442.000	1 laporan	329.000	1 laporan	450.000	1 laporan	450.000
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	2.750.000	1 laporan	400.000	1 laporan	525.000	1 laporan	525.000
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 data	-	0 data	-	384 data	780.000	584 data	780.000

				Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi		**100%**	**4.799.361.401**	**100%**	**5.341.872.076**	**100%**	**5.795.810.594**	**100%**	**5.795.810.594**
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 orang/bulan	4.793.499.401	63 orang/bulan	5.341.275.076	60 orang/bulan	5.794.910.594	60 orang/bulan	5.794.910.594
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	4.362.000	1 laporan	400.000	1 laporan	425.000	1 laporan	425.000
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	66 laporan	1.500.000	66 laporan	197.000	66 laporan	475.000	66 laporan	475.000
				Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		**100%**	**800.000**	**100%**	**350.000**	**100%**	**800.000**	**100%**	**800.000**
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 laporan	800.000	14 laporan	350.000	15 laporan	800.000	15 laporan	800.000
				Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah yang terlaksana		**0%**	**-**	**80%**	**-**	**80%**	**-**	**80%**	**3.000.000**

					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 paket	-	0 paket	-	0 paket	-	128 paket	1.000.000
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 orang		0 orang	-	0 orang	-	1 orang	1.000.000
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 orang		0 orang	-	0 orang	-	1 orang	1.000.000
				Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah		**100%**	**58.845.050**	**100%**	**20.905.321**	**100%**	**30.640.516**	**100%**	**30.640.516**
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	6.114.800	O paket	-	1 paket	2.115.800	1 paket	2.115.800
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	14.970.250	12 paket	11.086.850	3 paket	13.931.800	3 paket	13.931.800
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	6.575.000	0 paket	-	20 paket	3.502.500	20 paket	3.502.500
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	10.535.000	1 paket	4.770.000	2 paket	4.688.416	2 paket	4.688.416
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	20.650.000	1 laporan	5.048.471	1 laporan	6.402.000	1 laporan	6.402.000

				Persentase pengadaan barang milik daerah urusan pemerintah daerah yang terlaksana		**0%**	**-**	**80%**	**-**	**80%**	**6.370.500**	**80%**	**3.370.500**
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	1 unit	1.000.000
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	1 unit	1.000.000
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 unit	-	0 unit	-	1 unit	6.370.500	1 unit	1.370.500
				Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		**80%**	**1.414.046.000**	**80%**	**1.336.715.342**	**80%**	**1.115.775.000**	**80%**	**1.115.775.000**
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	6.500.000	1 laporan	11.500.000	2 laporan	11.500.000	2 laporan	11.500.000
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	155.000.000	3 laporan	240.715.342	12 laporan	290.000.000	12 laporan	290.000.000
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 laporan	1.252.546.000	5 laporan	1.084.500.000	12 laporan	814.275.000	12 laporan	814.275.000

				Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana		**80%**	**120.885.449**	**80%**	**20.793.250**	**80%**	**31.381.584**	**80%**	**31.381.584**
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 unit	**-**	0 unit	-	**17 unit**	**9.900.000**	**17 unit**	**9.900.000**
					Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	21 unit	100.985.449	19 unit	18.193.250	0 unit	-	0 unit	-
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	8.500.000	0 unit	-	2 unit	7.341.584	2 unit	7.341.584
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 unit	11.400.000	13 unit	2.600.000	45 unit	14.140.000	45 unit	14.140.000
			Persentase OPD yang menerapkan keterbukaan informasi publik			**100%**	**1.180.814.000**	**100%**	**1.861.940.000**	**100%**	**1.324.940.000**	**100%**	**1.324.940.000**

				Jumlah Kegiatan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		**100%**	**1.180.814.000**	**100%**	**1.861.940.000**	**100%**	**1.324.940.000**	**100%**	**1.324.940.000**
					jumlah dokumen hasil monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	1 dokumen	1.000.000.000	1 dokumen	1.112.000.000	0 dokumen	-	0 dokumen	-
					Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	0 rekomendasi	-	0 rekomendasi	-	12 rekomendasi	1.100.000.000	12 rekomendasi	1.100.000.000
					jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	12 dokumen	174.664.000	12 dokumen	149.940.000	0 dokumen	-	0 dokumen	-
					Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	0 media	-	0 media	-	9 media	149.940.000	9 media	149.940.000
					jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	12 dokumen	6.150.000	12 dokumen	100.000.000	0 dokumen	-	0 dokumen	-

					Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	0 permohonan	-	0 permohonan	-	12 permohonan	75.000.000	12 permohonan	75.000.000
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0 unit	-	66 unit	500.000.000	0 unit	-	0 unit	-
			Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi			**15%**	**1.500.000.000**	**18%**	**1.000.000.000**	**20%**	**1.875.000.000**	**22%**	**1.875.000.000**
				Terlaksanaya sistem jaringan intra pemerintah daerah		**15%**	**1.500.000.000**	**18%**	**1.000.000.000**	**20%**	**-**	**22%**	**-**
					jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah	1 paket	1.500.000.000	3 unit	1.000.000.000	0 unit	-	0 unit	-
				Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan		15%	-	18%	-	20%	1.875.000.000	22%	1.875.000.000

				pemerintah									
					Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	0 aplikasi	-	0	-	5 aplikasi	375.000.000	5 aplikasi	375.000.000
					Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	0 PD	-	0	-	48 PD	1.500.000.000	48 PD	1.500.000.000
			Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah			**20%**	**15.300.000**	**22%**	**25.000.000**	**50%**	**17.380.000**	**75%**	**17.380.000**
				Jumlah Kegiatan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah/Kabupaten Kota		**20%**	**15.300.000**	**22%**	**25.000.000**	**50%**	**17.380.000**	**75%**	**17.380.000**

					jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	1 dokumen	5.250.000	1 dokumen	1.910.200	0 dokumen	-	0 dokumen	-
					Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	0 dokumen	-	0 dokumen	-	1 dokumen	8.875.250	1 dokumen	8.875.250
					jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	61 orang	4.800.000	44 orang	16.089.800	0 orang	-	0 orang	-
					Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	0 orang	-	0 orang	-	48 orang	3.054.550	48 orang	3.054.550
					jumlah perangkat daerah yang mendapat pelatihan statistik sektoral dari BPS	61 orang	5.250.000	20 orang	7.000.000	0 orang	-	0 orang	-
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	0%	-	0%	-	60%	5.450.200	65%	5.450.200
			Persentase keamanan informasi pemerintah daerah			**20%**	**40.390.000**	**22%**	**3.000.000**	**44%**	**100.000.000**	**88%**	**100.000.000**
				Terlaksanaya Sosialisasi Keamanan Informasi		**20%**	**40.390.000**	**22%**	**3.000.000**	**44%**	**100.000.000**	**88%**	**100.000.000**

					jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	61 PD	40.390.000	61 PD	3.000.000	48 PD	100.000.000	48 PD	100.000.000

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dalam merumuskan strategi dan kebijakan perlu mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh.

A. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitik, realistik, rasional dan komprehensif selanjutnya strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan. Dalam mengembangkan tugas dan kewenangannya, Dinas Komunikasi dan Informatika harus memiliki pedoman/acuan agar pelaksanaan tugas dan fungsi tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh pemerintah sendiri maupun oleh masyarakat.

Strategi yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan harus disesuaikan dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang tertuang di dalam RPD Tahun 2024-2026. Penetapan strategi dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal mengetahui kekuatan dan kelemahan. Dari hasil pertimbangan tersebut ditetapkan strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan:

1. Meningkatkan layanan public yang diselenggarakan secara online serta mengembangkan aplikasi yang didasari integrase aplikasi dan integrasi data;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang didukung SDM yang cukup dan meningkatkan diseminasi informasi melalui media informasi;
3. Meningkatkan kesadaran keamanan informasi kepada PD;
4. Meningkatkan pemanfaatan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah;

5. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur Dinas Komunikasi Kab. Bangkalan.

B. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Adapun kebijakan yang dirumuskan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan, antara lain :

1. Mengoptimalkan layanan publik yang berbasis elektronik dan pengembangan aplikasi;
2. Mengembangkan kapasitas SDM aparatur dan masyarakat dalam keterbukaan informasi dan meningkatkan sarana dan prasarana guna menunjang keterbukaan informasi publik;
3. Standard keamanan informasi bagi PD;
4. Mengoptimalkan ketersediaan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah;
5. Mengoptimalkan kualitas kinerja pelayanan Dinas Kominfo Kab. Bangkalan.

Berikut adalah tabel keselarasan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan tahun 2024 - 2026.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan

Isu Strategis :			
VISI	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bangkalan yang Religius dan Sejahtera Berbasis Potensi Lokal		
MISI	Ke-2 Mewujudkan Birokrasi yang Profesional dan Berintegritas Tinggi		
Tujuan RPD	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan		
Sasaran RPD	Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bangkalan		
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**KEBIJAKAN**
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi komunikasi	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatkan layanan publik yang diselenggarakan secara online serta mengembangkan aplikasi yang didasari integrasi aplikasi dan integrasi data	Mengoptimalkan layanan publik yang berbasis elektronik dan pengembangan aplikasi oleh PD
	Meningkatnya Pelayanan Penyebarluasan Informasi yang tepat dan akurat	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang didukung SDM yang cukup dan meningkatkan diseminasi informasi melalui media informasi	Mengembangkan kapasitas SDM aparatur dan masyarakat dalam keterbukaan informasi dan meningkatkan sarana dan prasarana guna menunjang keterbukaan informasi publik
		Meningkatkan kesadaran keamanan informasi kepada PD	Standard keamanan informasi bagi PD
		Meningkatkan pemanfaatan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Mengoptimalkan ketersediaan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka menjalankan urusan wajib bidang lingkungan hidup serta untuk mewujudkan dan mencapai tujuan, sasaran Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika dan dengan memperhatikan strategi serta arah kebijakan maka telah disusun rencana program dan kegiatan berdasarkan Permendagri No 13 Th. 2006 Tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program adalah Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah.

Kegiatan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi serta dana atau kombinasi daripada kesemua jenis sumber daya tersebut.

Adapun Rencana Program, Kegiatan dan Indikator kinerja serta PendanaanIndikatif akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan PD. Diskominfo Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi komunikasi			**Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)**		**2,25**	**2,50**	**9.612.734.989**	**2,75**	**10.304.573.194**	**3,00**	**10.304.573.194**	**3,00**	**30.221.881.377**		
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik		**Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi**		**15%**	**18%**	**1.000.000.000**	**20%**	**1.875.000.000**	**22%**	**1.875.000.000**	**22%**	**4.750.000.000**		
		2.16.03	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**	**Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo**	**15%**	**18%**	**1.000.000.000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**18%**	**1.000.000.000**	**Diskominfo Bkln**	
		2.16.03.2.01	**Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunkana akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo**	**15%**	**18%**	**1.000.000.000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**18%**	**1.000.000.000**	**Diskominfo Bkln**	

		2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah	1 paket	3 unit	1.000.000.000	0 unit	-	0 unit	-	3 unit	1.000.000.000	**KABID APTIKA**	
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik		**Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi**		**15%**	**18%**	**-**	**20%**	**1.875.000.000**	**22%**	**1.875.000.000**	**22%**	**3.750.000.000**		
		2.16.03	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**	**Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi**	**15%**	**0%**	**-**	**20%**	**1.875.000.000**	**22%**	**1.875.000.000**	**22%**	**3.750.000.000**		
		2.16.03.2.02	**Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah**	**15%**	**0%**	**-**	**20%**	**1.875.000.000**	**22%**	**1.875.000.000**	**22%**	**3.750.000.000**		
		2.16.03.2.02.0020	**Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah**	**Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah**	**0%**	**0%**	**-**	**5 Aplikasi**	**375.000.000**	**5 Aplikasi**	**375.000.000**	**5 Aplikasi**	**750.000.000**		
		2.16.03.2.02.0024	**Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota**	**Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota**	**0%**	**0%**	**-**	**48 PD**	**1.500.000.000**	**48 PD**	**1.500.000.000**	**48 PD**	**3.000.000.000**		
	Meningkatnya Pelayanan Penyebarluasan Informasi yang tepat dan akurat		**Persentase keamanan informasi pemerintah daerah**		**20%**	**22%**	**3.000.000**	**44%**	**100.000.000**	**88%**	**100.000.000**	**88%**	**203.000.000**		
		2.21.02	**Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**	**Tingkat keamanan informasi pemerintah**	**20%**	**22%**	**3.000.000**	**44%**	**100.000.000**	**88%**	**100.000.000**	**88%**	**203.000.000**	**Diskominfo Bkln**	
		2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**	**Persentase pemanfaatan persandian untuk keamanan informasi**	**20%**	**22%**	**3.000.000**	**44%**	**100.000.000**	**88%**	**100.000.000**	**88%**	**203.000.000**	**Diskominfo Bkln**	

			Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**di lingkup PD**											
		2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	61 PD	61 PD	3.000.000	48 PD	100.000.000	48 PD	100.000.000	48 PD	**203.000.000**		
	Meningkatnya Pelayanan Penyebarluasan Informasi yang tepat dan akurat		**Persentase OPD yang menerapkan keterbukaan informasi publik**		**100%**	**100%**	**1.861.940.000**	**100%**	**1.324.940.000**	**100%**	**1.324.940.000**	**100%**	**4.511.820.000**		
		2.16.02	**Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik**	**Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi**	**100%**	**100%**	**1.861.940.000**	**100%**	**1.324.940.000**	**100%**	**1.324.940.000**	**100%**	**4.511.820.000**	**Diskominfo Bkln**	
		2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi**	**100%**	**100%**	**1.861.940.000**	**100%**	**1.324.940.000**	**100%**	**1.324.940.000**	**100%**	**4.511.820.000**	**Diskominfo Bkln**	
		2.16.02.2.01.0003	Monitoring Informasi Dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	jumlah dokumen hasil monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	1 dokumen	1 dokumen	1.112.000.000	0 dokumen	-	0 dokumen	-	1 dokumen	**1.112.000.000**	**KASI PKP**	
		2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	12 dokumen	12 dokumen	149.940.000	0 dokumen	-	0 dokumen	-	12 dokumen	**149.940.000**		
		2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	12 dokumen	12 dokumen	100.000.000	0 dokumen	-	0 dokumen	-	12 dokumen	**100.000.000**		
		2.16.02.2.01.0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	0 unit	66 unit	500.000.000	0	-	0	-	66 unit	**500.000.000**		

			Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota											
		2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	0 permohonan	0	-	12 permohonan	75.000.000	12 permohonan	75.000.000	24 permohonan	150.000.000		
		2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	0 rekomendasi	0	-	12 rekomendasi	1.100.000.000	12 rekomendasi	1.100.000.000	24 rekomendasi	2.200.000.000		
		2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	0 media	0	-	9 media	149.940.000	9 media	149.940.000	9 media	299.880.000		
	Meningkatnya Pelayanan Penyebarluasan Informasi yang tepat dan akurat		**Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah**		**20%**	**22%**	**25.000.000**	**50%**	**17.380.000**	**75%**	**17.380.000**	**75%**	**59.760.000**		
		2.20.02	**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah**	**20%**	**22%**	**25.000.000**	**50%**	**17.380.000**	**75%**	**17.380.000**	**75%**	**59.760.000**	**Diskominfo Bkln**	
		2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kegiatan Statistik Di Lingkup Pd**	**20%**	**22%**	**25.000.000**	**50%**	**17.380.000**	**75%**	**17.380.000**	**75%**	**59.760.000**	**Diskominfo Bkln**	
		2.20.02.2.01.0001	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	1 dokumen	1 dokumen	1.910.200	0 dokumen	-	0 dokumen	-	1 dokumen	**1.910.200**	**KABID SDTIK**	

		2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Sdm Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi	jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	61 orang	44 orang	16.089.800	0 orang	-	0 orang	-	44 orang	**16.089.800**		
		2.20.02.2.01.0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	jumlah perangkat daerah yang mendapat pelatihan statistik sektoral dari BPS	61 orang	20 orang	7.000.000	0 orang	-	0 orang	-	20 orang	**7.000.000**		
		2.20.02.2.01.0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	0 orang	0	-	48 orang	3.054.550	48 orang	3.054.550	96 orang	**6.109.100**		
		2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	0%	0	-	60%	5.450.200	65%	5.450.200	65%	**10.900.400**		
		2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	0 dokumen	0	-	1 dokumen	8.875.250	1 dokumen	8.875.250	2 dokumen	**17.750.500**		
													-		
	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan komunikasi dan Informatika		**Nilai Sakip PD**		**60**	**60**	**6.722.794.989**	**61**	**6.987.253.194**	**62**	**6.987.253.194**	**62**	**20.697.301.377**		
			Indeks kepuasan masyarakat		**83**	**85**		**87**		**90**		**90**			
		2.16.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**85**	**85**	**6.722.794.989**	**87**	**6.987.253.194**	**90**	**6.987.253.194**	**90**	**20.697.301.377**	**Diskominfo Bkln**	
		2.16.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**2.159.000**	**100%**	**6.475.000**	**100%**	**6.475.000**	**100%**	**15.109.000**	**Diskominfo Bkln**	
		2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	4 dokumen	3 dokumen	299.250	3 dokumen	720.000	3 dokumen	720.000	9 dokumen	1.739.250	**KASUBAG KEUANGAN DAN PERENCAN**	

		2.16.01.2.01.0002	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Rka-Skpd	Jumlah dokumen rka-skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen rka-skpd	1 dokumen	1 dokumen	160.000	1 dokumen	1.500.000	1 dokumen	1.500.000	3 dokumen	3.160.000	**AAN, KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**	
		2.16.01.2.01.0003	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-Skpd	Jumlah dokumen perubahan rka-skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan rka-skpd	1 dokumen	1 dokumen	362.000	1 dokumen	1.500.000	1 dokumen	1.500.000	3 dokumen	3.362.000		
		2.16.01.2.01.0004	Koordinasi Dan Penyusunan Dpa-Skpd	Jumlah dokumen dpa-skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen dpa-skpd	1 dokumen	1 dokumen	233.750	1 dokumen	500.000	1 dokumen	500.000	3 dokumen	1.233.750		
		2.16.01.2.01.0005	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Dpa-Skpd	Jumlah dokumen perubahan dpa-skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan dpa-skpd	1 dokumen	1 dokumen	375.000	1 dokumen	500.000	1 dokumen	500.000	3 dokumen	1.375.000		
		2.16.01.2.01.0006	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	1 laporan	1 laporan	329.000	1 laporan	450.000	1 laporan	450.000	3 laporan	1.229.000		
		2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 laporan	1 laporan	400.000	1 laporan	525.000	1 laporan	525.000	3 laporan	1.450.000		
		2.16.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 data	0 data	0	384 data	780.000	584 data	780.000	584 data	1.560.000		
		2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi**	**100%**	**100%**	**5.341.872.076**	**100%**	**5.795.810.594**	**100%**	**5.795.810.594**	**100%**	**16.933.493.264**		
		2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	63 orang/bulan	63 orang/bulan	5.341.275.076	60 orang/bulan	5.794.910.594	60 orang/bulan	5.794.910.594	60 org/bln	16.931.096.264		
		2.16.01.2.02.0005	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	jumlah laporan keuangan akhir tahun skpd dan laporan hasil	1 laporan	1 laporan	400.000	1 laporan	425.000	1 laporan	425.000	3 laporan	1.250.000		

				koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd											
		2.16.01.2.02.0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran Skpd	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/ smesesteran skpd dan laporan koordinasi penyusunan laporan bulanan/triwulanan/ smesesteran skpd	66 laporan	66 laporan	197.000	66 laporan	475.000	66 laporan	475.000	198 laporan	1.147.000		
		2.16.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100%**	**100%**	**350.000**	**100%**	**800.000**	**100%**	**800.000**	**100%**	**1.950.000**		
		2.16.01.2.03.0005	Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada Skpd	jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada skpd	14 laporan	14 laporan	350.000	15 laporan	800.000	15 laporan	800.000	44 laporan	1.950.000		
		2.16.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terlaksana**	**0%**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**80%**	**3.000.000**	**80%**	**3.000.000**		
		2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0	0 paket	-	0 paket	-	128 paket	1.000.000	128 paket	1.000.000		
		2.16.01.2.05.0009	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	0	0 orang	-	0 orang	-	1 orang	1.000.000	1 orang	1.000.000		
		2.16.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0 orang	-	0 orang	-	1 orang	1.000.000	1 orang	1.000.000		
		2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**20.905.321**	**100%**	**30.640.516**	**100%**	**30.640.516**	**100%**	**82.186.353**		
		2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	O paket	-	1 paket	2.115.800	1 paket	2.115.800	2 paket	4.231.600		
		2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	12 paket	12 paket	11.086.850	3 paket	13.931.800	3 paket	13.931.800	6 paket	38.950.450		

				yang disediakan											
		2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	0 paket	-	20 paket	3.502.500	20 paket	3.502.500	40 paket	7.005.000		
		2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	1 paket	4.770.000	2 paket	4.688.416	2 paket	4.688.416	5 paket	14.146.832		
		2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	50 laporan	1 laporan	5.048.471	1 laporan	6.402.000	1 laporan	6.402.000	3 laporan	17.852.471		
		2.16.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana**	**0%**	**80%**	**-**	**80%**	**6.370.500**	**80%**	**3.370.500**	**80%**	**9.741.000**		
		2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Diadakan	0 unit	0 unit	-	0 unit	-	1 unit	1.000.000	1 unit	1.000.000		
		2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 unit	0 unit	-	1 unit	6.370.500	1 unit	1.370.500	2 unit	7.741.000		
		2.16.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Diadakan	0 unit	0 unit	-	0 unit	-	1 unit	1.000.000	1 unit	1.000.000		
		2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**80%**	**80%**	**1.336.715.342**	**80%**	**1.115.775.000**	**80%**	**1.115.775.000**	**80%**	**3.568.265.342**		
		2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	1 laporan	11.500.000	2 laporan	11.500.000	2 laporan	11.500.000	5 laporan	34.500.000		
		2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3 laporan	3 laporan	240.715.342	12 laporan	290.000.000	12 laporan	290.000.000	27 laporan	820.715.342		
		2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	5 laporan	5 laporan	1.084.500.000	12 laporan	814.275.000	12 laporan	814.275.000	19 laporan	2.713.050.000		
		2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**80%**	**80%**	**20.793.250**	**80%**	**31.381.584**	**80%**	**31.381.584**	**80%**	**83.556.418**		

			Daerah	**Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**											
		2.16.01.2.09.0001	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya**	0 unit	**0 unit**	**-**	**17 unit**	**9.900.000**	**17 unit**	**9.900.000**	**17 unit**	**19.800.000**		
		2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	21 unit	19 unit	18.193.250	0 unit	-	0 unit	-	19 unit	18.193.250		
		2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	0 unit	-	2 unit	7.341.584	2 unit	7.341.584	2 unit	14.683.168		
		2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	25 unit	13 unit	2.600.000	45 unit	14.140.000	45 unit	14.140.000	103 unit	30.880.000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan disamping sebagai Perangkat Daerah Penanggungjawab terpenuhinya target Indikator sasaran Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam RPD Kabupaten Bangkalan 2024 - 2026, juga berkewajiban memenuhi target 5 (lima) indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan keberhasilan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan selama 3 (tiga) tahun mendatang yang tertulis pada tabel 7.1 dan 7.2 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja PD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja PD Diskominfo pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		18%	20%	22%	22%
2	Persentase OPD yang menerapkan keterbukaan informasi publik		100%	100%	100%	100%
3	Persentase keamanan informasi pemerintah daerah		22%	44%	88%	88%
4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		22%	50%	75%	75%
5	Nilai Sakip PD		60	61	62	62
6	Indeks kepuasan masyarakat		85	87	90	90

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2023	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
					2024		2025		2026			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi komunikasi	**Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**	**Indeks**	**1,89**	**2,25**	**2,5**	9.612.734.989	**2,75**	10.304.573.194	**3**	10.304.573.194	**3**	30.221.881.377
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks	83	85	85	6.722.794.989	87	6.987.253.194	90	6.987.253.194	90	20.697.301.377
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Persentase	100%	100%	100%	1.861.940.000	100%	1.324.940.000	100%	1.324.940.000	100%	4.511.820.000
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online	Persentase	35%	15%	18%	-	20%	1.875.000.000	22%	1.875.000.000	22%	3.750.000.000

	dan terintegrasi											
	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase	35%	15%	18%	1.000.000.000	20%	-	22%	-	22%	1.000.000.000
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persentase	30%	30%	22%	25.000.000	50%	17.380.000	75%	17.380.000	75%	59.760.000
Program Penyelenggaraan Pengelolaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Persentase	35%	11%	22%	3.000.000	44%	100.000.000	88%	100.000.000	88%	203.000.000

BAB VIII
PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan Tahun 2024–2026 mengacu pada pembangunan urusan komunikasi dan informatika dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala yang ada dan mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan.

Perubahan Rencana Strategis Diskominfo Tahun 2024 - 2026 ini menjadi pedoman bagi sekretariat, seluruh bidang, dan unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) 3 (tiga) tahun yang akan datang serta menjadi alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahunan.

Untuk mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan tahun 2024 - 2026, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Tahun 2024 - 2026 dengan sebaik-baiknya sehingga indicator kinerja sasaran dan indicator program yang telah ditetapkan dapat tercapai.
2. Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan Renstra Tahun 2024 - 2026, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan melalui Sekretariat dan Bidang- bidang diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan.
3. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 - 2026 merupakan indicator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 3 (tiga) tahunan, sehingga diharapkan dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang sehingga sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan.

Bangkalan, 16 Desember 2024

Plt. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Bangkalan

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Mohammad Hasan Faisol, S.STP., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 198307142001121002